

ANALISIS PROSES PENYUSUNAN RENCANA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI BENGKULU

Oleh:

Cindy Nur Permata Sari, Suratman, Jatmiko Yogopriyatno

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bengkulu

A
B
S
T
R
A
K

Perencanaan pembangunan perlu dibuat agar cita-cita dari suatu daerah dapat tercapai dengan baik. Untuk itu penelitian ini kemudian bertujuan mengetahui proses penyusunan rencana kerja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Bengkulu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Aspek penelitian berpedoman pada teori proses perencanaan yang dikemukakan oleh Handoko. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada aspek menetapkan tujuan dan serangkaian tujuan diketahui dalam menetapkan keputusan tentang keinginan dinas, hal yang dilakukan adalah mengajukan usulan kepada pemerintah. Kemudian dalam menetapkan keputusan terkait kebutuhan organisasi dilakukan berdasarkan peraturan pemerintah serta surat keputusan gubernur. Pada aspek merumuskan keadaan saat ini diketahui identifikasi pemahaman akan posisi organisasi saat ini dari tujuan yang hendak dicapai dilakukan dengan cara memahami dengan baik peraturan pemerintah, visi dan misi dinas, melakukan tugas dan fungsi bidang. Kemudian mengenai identifikasi pemahaman dinas akan posisi organisasi dan sumber daya yang tersedia diketahui bahwa saat ini sumber daya manusia serta fasilitas yang ada di dinas rata-rata sudah cukup baik. Pada aspek mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan, diketahui bahwa pada faktor lingkungan internal kemudahan yang dimiliki dinas adalah SDM yang baik, kemudian hambatan yang dimiliki dapat diatasi dengan. Kemudian pada faktor lingkungan eksternal yang menjadi kemudahan serta hambatan adalah antusiasme masyarakat. Pada aspek mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan, dalam melakukan pengembangan berbagai alternatif kegiatan untuk pencapaian tujuan dilakukan berdasarkan dengan visi, misi dan juga strategi yang sudah disusun oleh dinas. Pihak yang terlibat dalam pembuatan perencanaan adalah Bappeda, biro keuangan dan biro administrasi. Lalu, dalam melakukan penilaian alternatif kegiatan didasarkan pada kegiatan yang bersifat memajukan serta mensejahterakan masyarakat. Lalu, melakukan pemilihan alternatif terbaik dilakukan berdasarkan pada anggaran serta prioritas yang ada pada tahun tersebut.

Kata Kunci: Perencanaan Pembangunan, Proses Penyusunan Rencana Kerja

Development planning needs to be made so that the ideals of an area can be achieved well. For this reason, this research aims to find out the process of preparing work plans at the Bengkulu Province Community and Village Empowerment Service. The method used in this research is descriptive qualitative. The research aspect is guided by the planning process theory put forward by Handoko. The research results show that in the aspect of setting goals and a series of known goals in making decisions about service wishes, what is done is to submit a proposal to the government. Then, decisions regarding organizational needs are made based on government regulations and the governor's decree. In the aspect of formulating the current situation, it is known that identifying an understanding of the current position of the organization and the goals to be achieved is carried out by properly understanding government regulations, the vision and mission of the service, carrying out field tasks and functions. Then regarding the identification of the department's understanding of the organization's position and available resources, it is known that currently the human resources and facilities available in the department are on average quite good. In the aspect of identifying all conveniences and obstacles, it is known that in terms of internal environmental factors, the convenience that the department has is good human resources, then the obstacles it has can be overcome by. Then, the external environmental factors that facilitate and hinder are people's enthusiasm. In the aspect of developing a plan or series of activities, developing various alternative activities to achieve goals is carried out based on the vision, mission and strategies that have been prepared by the department. The parties involved in planning are Bappeda, financial bureau and administration bureau. Then, in assessing alternative activities, they are based on activities that promote and improve the welfare of society. Then, selecting the best alternative is done based on the existing budget and priorities for that year.

A
B
S
T
R
A
C
T

Keywords: Development Planning, Work Plan Preparation Process

A. PENDAHULUAN

Setiap negara pasti memiliki tujuan, tujuan tersebut bertujuan untuk mensejahterakan rakyatnya. Untuk mewujudkan tujuan negara dalam pembangunan nasional maka pemerintah membuat salah satu Undang-Undang seperti Nomor 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Salah satu tujuan perencanaan pembangunan nasional tersebut adalah menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkelanjutan dan berkeadilan. Perencanaan itu seperti RPJP (Rencana Pembangunan Jangka Panjang) RPJP sendiri adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun. RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun. RKP (Rencana Kerja Pemerintah) adalah dokumen perencanaan untuk periode satu tahun.

Berdasarkan RPJP nasional maka dapat diketahui bahwa saat ini telah memasuki RPJM pada tahun keempat yaitu RPJM 2020-2025 yaitu dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan diberbagai bidang. Keputusan Presiden No. 12 tahun 2020 tentang penetapan penyebaran bencana non alam Covid-19 sebagai bencana nasional perlu dilakukan penyesuaian terhadap kebijakan dan program dalam RPJMD Provinsi Bengkulu tahun 2016-2021 untuk menanggulangi dampak Covid-19 ditahun 2020-2021, tentunya hal ini akan berpengaruh pada program-program dan rencana yang sudah ditetapkan sebelumnya. Maka dari itu Bappenas memfokuskan Rencana Kerja Pemerintah di tahun 2021 ini berfokus pada pemulihan ekonomi dan sosial pasca pandemi Covid19, guna mengejar target RPJMN 2020- 2025 untuk itu tema dari RKP 2021 adalah mempercepat pemulihan ekonomi dan formasi sosial dengan pemulihan industri pariwisata dan investasi, reformasi sistem kesehatan nasional, reformasi sistem jaringan pengamanan sosial dan reformasi sistem ketahanan bencana.

Adapun landasan hukum yang ada sebagai perubahan RPJMD ini adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Sejalan dengan perubahan peraturan tersebut maka Rencana Kerja yang telah dirancang sebelumnya tentu mengalami perubahan pula pada perencanaan rencana kerja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Bengkulu dikarenakan terjadinya bencana Non alam Covid-19. Diketahui untuk program rencana kerja tahun 2021 diketahui saat ini sedang dalam masa pembuatan atau perencanaan RENSTRA (RencanaStrategis). Seharusnya tahun adalah RPJMD 2021-2025 akan tetapi untuk program kerja yang akan dikeluarkan pada tahun 2021 Dinas PMD

masih menjalankan program lanjutan yang terdapat pada tahun lalu dikarenakan masih dalam tahap pembuatan, hal ini berdasarkan hasil wawancara yang disampaikan oleh salah satu staff dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi Bengkulu.

“Seharusnya tahun ini kita RPJMD 2021-2025 namun saat ini belum, karena masih dalam tahap pembuatan rencana strategisnya, jadi untuk sementara saat ini kita masih melanjutkan program-program di tahun sebelumnya. Jadi tahun ini masuk masa peralihan yang artinya masih berpanduan dengan yang lama”. (Staf Bidang Perencanaan dan Evaluasi DPMD, 29 Maret 2021).

Maka dari itu program yang telah direncanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Bengkulu tepatnya pada tahun 2020 belum dapat direalisasikan secara keseluruhan dan hanya dijalankan satu program kegiatan saja selama tahun 2020 yaitu kegiatan Penguatan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa. Hal ini dikarenakan adanya bencana Non alam Covid-19 maka alokasi dana yang sudah dianggarkan untuk RPJM, yang mana secara tidak langsung berpengaruh pada program lainnya yang belum dapat dilaksanakan pada tahun 2020. Realisasi capaian kinerja dan anggaran renstra perangkat daerah yaitu 10 Kabupaten/Kota dengan anggaran Rp. 249.563.000, dalam kegiatan ini tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran renstra perangkat daerah adalah (96%), ini diperkuat oleh pernyataan salah satu staf Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Bengkulu.

“Karena ditahun 2020 sedang mengalami pandemi, kita belum bisa mengerjakan beberapa program kegiatan lainnya. kegiatan di kantor juga tidak begitu banyak, jadi kegiatan yang dikerjakan hanya satu program kegiatan saja yaitu kegiatan Penguatan Kader ini dan alhamdulillah kegiatannya bisa berjalan dan terlaksana dengan baik”. (Staf Bidang Perencanaan dan Evaluasi DPMD, 16 juli 2021),.

Melihat dari persentase keberhasilan kegiatan ini pada tahun 2020 yang mencapai 96%, maka menimbulkan pertanyaan mengapa pada tahun 2019 realisasi keberhasilan hanya 57,21% saja. Tentu hal ini menjadi salah satu masalah yang perlu diketahui secara lebih mengenai bagaimana rencana kerja tahun 2020 pada kegiatan Penguatan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa ini, yang mana pada tahun 2020 sedang adanya pandemi Covid-19 sehingga beberapa kegiatan lainnya terhambat dan bahkan belum bisa dijalankan.

B. LANDASAN TEORI

Teori Rencana Kerja dan Perencanaan

Dalam Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah, Rencana Kerja ialah suatu proses mempersiapkan usaha atau kegiatan yang akan dilakukan secara sistematis dan logis, untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan sebelumnya oleh

pimpinan. Sementara itu dalam Rencana Kerja tentu harus memiliki perencanaan yang baik untuk memulainya, menurut Handoko (dalam Frisiska 2017, h.32) salah satu aspek penting perencanaan adalah pembuatan keputusan (decision making), proses pengembangan dan penyeleksian sekumpulan kegiatan memecahkan suatu masalah tertentu. Keputusan-keputusan harus dibuat pada berbagai tahap dalam proses perencanaan. Semua proses perencanaan pada dasarnya melalui empat tahap, meliputi hal-hal berikut: a) menetapkan tujuan atau serangkaian tujuan; b) merumuskan keadaan saat ini; c) mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan perlu diketahui faktor lingkungan internal dan faktor lingkungan eksternal; dan 4) mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan yang mencakup Pengembangan berbagai alternatif kegiatan untuk pencapaian tujuan, penilaian alternatif-alternatif, pemilihan alternatif terbaik diantara berbagai alternatif yang ada.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan penelitian pada Proses Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Bengkulu. Adapun aspek dalam penelitian ini diadopsi dari proses perencanaan yang dikemukakan oleh Handoko (dalam Frisiska 2017, h.32) yaitu menetapkan tujuan atau serangkaian tujuan, merumuskan keadaan saat ini, mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan serta mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan. Penelitian ini dilakukan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Bengkulu. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data primer dan data sekunder yang terdiri dari observasi, wawancara dan dokumentasi. Penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan melalui teknik purposive sampling. Analisis data dalam penelitian dilakukan dengan menggunakan metode Miles dan Huberman, yaitu reduksi data, penyajian data, kesimpulan dan verifikasi.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Menetapkan Tujuan dan Serangkaian Tujuan

Pada aspek ini yang dimaksudkan menetapkan tujuan dan serangkaian tujuan diambil dari teori proses perencanaan menurut Handoko (dalam Frisiska 2017, h.32) yang merupakan penetapan atau penentuan keputusan-keputusan tentang keinginan. Kemudian yang kedua membuat keputusan-keputusan tentang kebutuhan organisasi atau kelompok kerja. Pengambilan keputusan-keputusan baik dan bijak tersebut penting untuk membuat perencanaan terlebih dahulu melalui penyusunan strategi dan memutuskan cara terbaik untuk mencapai tujuan.

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan diketahui bahwa dalam menetapkan atau

menentukan keputusan-keputusan tentang keinginan dinas hal yang dilakukan oleh dinas adalah mengajukan usulan kepada pemerintah. Usulan tersebut diajukan agar dinas dapat mewujudkan apa saja yang menjadi keinginan dinas dalam rangka mensejahterakan masyarakat.

Sebelum adanya pengajuan usulan perlu diadakan penyiapan rencana kerja tahunan serta rencana strategis atau Renstra yang dibuat untuk lima tahun yang akan datang. Hal ini kemudian sesuai dengan yang ada pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pada Pasal 9 Ayat 2 yakni penyusunan RPJM Nasional/Daerah dan RKP/RKPD dilakukan melalui urutan kegiatan:

- a. penyiapan rancangan awal rencana pembangunan;
- b. penyiapan rancangan rencana kerja;
- c. musyawarah perencanaan pembangunan;
- d. penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan.

Sehingga tujuan yang diusulkan oleh dinas harus berdasarkan dengan rencana kerja maupun rencana strategis yang telah ditetapkan sebelumnya. Sehingga dinas perlu melihat rencana strategis seperti apa yang sudah ditetapkan dalam membuat perencanaan tahunan untuk program kerja yang ada di dinas.

Berikutnya berdasarkan hasil penelitian mengenai keinginan seperti apa yang direncanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Bengkulu diketahui bahwa untuk menetapkan tujuan dinas perlu adanya keinginan-keinginan yang ingin dicapai oleh dinas. Sehingga pada penelitian ini perlu diketahui mengenai keinginan-keinginan tersebut. Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Bengkulu diketahui memiliki lima bidang didalamnya sehingga lima bidang yang ada tersebut perlu merencanakan kegiatan maupun program yang akan dilakukan untuk waktu lima tahun yang akan datang.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa terdapat tujuh program yang menjadi prioritas Rencana Kerja Pemerintah. Tujuh program prioritas tersebut kemudian dikembangkan menjadi dua puluh sembilan program kerja oleh Dinas PMD Provinsi Bengkulu. Program-program kerja yang sudah dikembangkan tersebut ditetapkan guna mencapai keinginan-keinginan maupun tujuan dari Dinas PMD Provinsi Bengkulu. Berdasarkan hasil penelitian juga diketahui bahwa dari berbagai perencanaan program yang sudah dibuat oleh Dinas PMD Provinsi Bengkulu, hanya ada lima program yang terealisasikan. Program-program tersebut diantaranya :

- a. Program Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna yang dilaksanakan pada 2 Februari 2022, kegiatan dalam agenda program desa digital tidak hanya konsep digital tetapi juga ramah lingkungan.

- b. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat yang dilaksanakan pada 9-10 Februari 2022, kegiatan program platform pengembangan ekonomi desa melalui digitalisasi.
- c. Program Fasilitasi Pengembangan Inovasi Desa yang dilaksanakan pada Dilaksanakan pada 1 Maret 2022, kegiatan ini dilakukan berupa kerjasama bersama Bank Indonesia Bengkulu untuk pengembangan desa melalui Bumdes Provinsi Bengkulu.
- c. Program Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan yang dilaksanakan pada tanggal 24 Maret 2022, kegiatan ini dilakukan melalui sosialisasi desa wisata guna untuk mendorong kesejahteraan masyarakat melalui program pengembangan desa wisata tahun 2022 tersebut.
- d. Program Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga yang Dilaksanakan pada 11-13 Oktober 2022, dalam agenda kegiatan supervisi pelaksanaan program pokok PKK di kabupaten/kota tahun 2022 diantaranya Seluma, Bengkulu dan Kaur.

Dari berbagai program yang sudah direncanakan dan hanya lima yang terealisasi maka dapat diketahui bahwa hanya program prioritas dinas saja yang dapat terealisasi karena keterbatasan akan dana maupun waktu. Kemudian dari hasil penelitian juga diketahui bahwa dalam menetapkan keputusan terkait kebutuhan organisasi dilakukan berdasarkan peraturan pemerintah yang sudah diterapkan. Kemudian, selain itu penetapan keputusan akan kebutuhan organisasi juga dilakukan berdasarkan surat keputusan yang sudah ditetapkan oleh gubernur yang sudah sesuai dengan struktur organisasi dari dinas yang tentunya ditetapkan berdasarkan bidang-bidang yang sudah ditentukan oleh pemerintah.

Merumuskan Keadaan Saat Ini

Dalam merumuskan keadaan saat ini perlu dilihat mengenai identifikasi pemahaman akan posisi organisasi sekarang dari tujuan yang hendak dicapai serta mengidentifikasi pemahaman akan posisi organisasi dari sumber daya yang tersedia. Beberapa hal tersebut perlu dilakukan untuk mencapai tujuan, karena tujuan dan rencana menyangkut waktu yang akan datang. Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan diketahui bahwa identifikasi pemahaman akan posisi organisasi saat ini dari tujuan yang hendak dicapai dilakukan dengan cara:

- a. Memahami dengan baik peraturan pemerintah yang sudah ada, dengan memahami peraturan pemerintah dengan baik dan jelas, dinas akan lebih mudah untuk mencapai tujuan yang sudah direncanakan sebelumnya.
- b. Mengetahui visi dan misi dinas dengan baik, dengan mengetahui apa saja visi dan misi dinas maka perencanaan yang akan dibuat dinas tidak akan bertentangan dengan visi dan misi yang berlaku.

Sehingga, hal tersebut juga mempermudah dinas untuk mencapai tujuannya.

c. Melakukan tugas dan fungsi dari masing-masing bidang yang sudah ada. Dengan melakukan tugas dan fungsi dari masing-masing bidang yang ada, maka bidang-bidang yang ada di dinas akan lebih fokus terhadap tugas dan fungsi masing-masing. Hal tersebut diharapkan agar dinas dapat menyelesaikan dengan baik tujuan yang hendak dicapai.

d. Mengetahui tentang peraturan-peraturan yang terbaru agar dinas tidak mengalami ketertinggalan. Mengetahui hal-hal baru tersebut dilakukan agar dinas dapat mencapai tujuan mereka dengan baik dengan mengikuti berbagai aturan yang ada.

Berikutnya, berdasarkan hasil penelitian mengenai identifikasi pemahaman dinas akan posisi organisasi dan sumber daya yang tersedia diketahui bahwa saat ini sumber daya manusia yang ada di Dinas PMD rata-rata sudah memiliki pendidikan yang cukup baik. Sebagian besar dari pegawai yang ada di dinas memiliki gelar Strata Satu (S1), kemudian ada juga yang Strata Dua (S2). Namun, dari hasil penelitian diketahui bahwa masih terdapat pegawai dengan tamatan Sekolah Menengah Atas (SMA). Dilihat dari hasil penelitian tersebut maka diketahui bahwa pegawai yang ada di dinas sudah cukup memadai. Kemudian untuk sumber daya berupa fasilitas yang ada di dinas diketahui dari hasil penelitian juga sudah dilengkapi dengan cukup baik, walaupun masih ada beberapa kekurangan seperti kekurangan lemari, kursi dan lain-lain.

Mengidentifikasi Segala Kemudahan dan Hambatan

Segala kekuatan dan kelemahan serta kemudahan dan hambatan perlu diidentifikasi untuk mengukur kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan. Oleh karena itu dalam mengidentifikasi kemudahan dan hambatan perlu diketahui mengenai faktor lingkungan internal dan faktor lingkungan eksternal. Kedua hal tersebut perlu diketahui agar dapat membantu organisasi mencapai tujuannya atau yang mungkin menimbulkan masalah. Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan diketahui bahwa kemudahan yang ada pada faktor lingkungan internal dinas adalah sumber daya manusia yang dimiliki oleh dinas dapat menjalankan tugas dengan baik seperti melakukan kerja sama dengan baik. Maka, dengan adanya hal tersebut sangat memberi kemudahan bagi dinas untuk mencapai tujuan. Dengan adanya pegawai yang dapat bekerja sama dengan baik maka lebih mudah bagi suatu dinas dalam mencapai suatu tujuan maupun membuat suatu perencanaan dengan baik pula. Selain itu, pegawai yang ada di Dinas PMD juga menjalankan tugas berdasarkan dengan kepentingan masyarakat terlebih dahulu, sehingga diharapkan dinas dapat memenuhi kepentingan masyarakat dengan baik.

Berikutnya masih terkait faktor lingkungan internal, peneliti juga menampilkan hasil penelitian terkait hambatan atau kendala yang ada di Dinas PMD. Berdasarkan hasil penelitian

diketahui bahwa tidak ada kendala yang begitu signifikan terjadi di Dinas PMD. Sehingga dari hasil penelitian dapat dilihat bahwa Dinas PMD dapat mengatasi dengan baik mengenai kendala-kendala yang terjadi, maka dari itu tidak ada kendala yang begitu signifikan terjadi. Berdasarkan hasil penelitian juga diketahui bahwa hal tersebut dikarenakan Dinas PMD melakukan serta menjalankan tugas berdasarkan aturan yang berlaku. Selain itu, sumber daya manusia yang ada di Dinas PMD juga menjalankan tugas dengan baik. Maka dengan alasan tersebut dapat dikatakan bahwa tidak ada kendala yang begitu signifikan terjadi. Berikutnya selain faktor internal, juga terdapat faktor eksternal yang perlu dilihat guna mencari tahu kemudahan serta hambatan yang ada di dinas. Hal pertama dari faktor eksternal yang peneliti bahas adalah mengenai kemudahan yang ada di Dinas PMD, maka berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan diketahui bahwa kemudahan pada faktor lingkungan eksternal di Dinas PMD adalah antusias masyarakat. Antusias masyarakat merupakan suatu hal yang perlu dimiliki dalam merencanakan suatu program. Sehingga jika suatu dinas sudah mendapatkan antusias dan keikutsertaan masyarakat, hal ini kemudian menjadi kemudahan bagi dinas dalam menjalankan program.

Selain itu, antusias masyarakat juga menjadi semangat bagi dinas dalam membuat, merencanakan serta melakukan suatu program. Selain membahas mengenai kemudahan pada faktor eksternal, peneliti juga membahas mengenai hambatan atau kendala yang terjadi. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa hambatan yang kerap kali terjadi adalah masyarakat tidak menyambut dengan baik mengenai pengembangan desa yang sudah direncanakan oleh pihak dinas. Serta masyarakat juga tidak mau ikut bekerja sama. Sehingga dari hal tersebut diketahui bahwa antusias masyarakat menjadi kemudahan sekaligus menjadi hambatan bagi dinas dalam melakukan suatu perencanaan. Maka berdasarkan hal tersebut juga dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa antusias masyarakat menjadi hal yang penting dalam merencanakan serta menjalankan suatu program.

Mengembangkan Rencana atau Serangkaian Kegiatan

Mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan menurut Handoko merupakan tahapan terakhir dalam membuat suatu perencanaan hal tersebut dilakukan dengan melakukan pengembangan berbagai alternatif kegiatan untuk pencapaian tujuan, melakukan penilaian alternatif-alternatif kegiatan dan melakukan pemilihan alternatif terbaik diantara berbagai alternatif yang ada.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa dalam melakukan pengembangan berbagai alternatif kegiatan untuk pencapaian tujuan dilakukan berdasarkan dengan visi, misi dan juga strategi yang sudah disusun oleh Dinas PMD. Hal ini kemudian sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 14 Ayat 2 sebagai berikut:

“...Kepala Bappeda menyiapkan rancangan awal RPJM Daerah sebagai penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah ke dalam strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, program prioritas Kepala Daerah, dan arah kebijakan keuangan Daerah...” Hal tersebut dilakukan untuk meyakinkan serta mendukung kegiatan-kegiatan yang ingin dilakukan dalam mencapai tujuan yang berhubungan dengan program pemerintah. Pengembangan kegiatan tersebut salah satu contohnya adalah penanggulangan kemiskinan melalui program-program yang sudah direncanakan.

Berikutnya dalam mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan, hal yang dilakukan adalah melakukan penilaian alternatif-alternatif kegiatan. Maka berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa penilaian terhadap alternatif-alternatif kegiatan di Dinas PMD didasarkan pada kegiatan yang bersifat memajukan serta mensejahterakan masyarakat. Hal ini kemudian berlaku untuk program yang sudah dikeluarkan maupun untuk program yang baru diusulkan. Contoh dari kegiatan yang bersifat memajukan serta mensejahterakan masyarakat tersebut adalah kegiatan Bumdes (Badan Usaha Milik Desa) dan Desa Maju, yang mana kegiatan tersebut merupakan kegiatan alternatif yang sejalan dengan fungsi Dinas PMD.

Dari hasil penelitian juga dapat dilihat bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatan perencanaan di Dinas PMD terdapat tiga pihak yang menjadi tim inti yakni Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah), kemudian dari biro keuangan dinas, lalu yang terakhir dari biro administrasi dinas. Ketiga pihak yang terlibat tersebut berurusan langsung dengan penyusunan anggaran, laporan kegiatan, laporan realisasi dan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah.

Kemudian yang terakhir dalam mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan, hal yang dilakukan adalah melakukan pemilihan alternatif terbaik diantara berbagai alternatif yang ada. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pemilihan alternatif kegiatan di Dinas PMD dilakukan berdasarkan pada anggaran serta prioritas yang ada pada tahun tersebut. Berdasarkan hasil penelitian dilihat bahwa jika ada sepuluh program yang ingin dikeluarkan pada tahun ini, namun memiliki kendala dengan anggaran yang kurang memadai. Maka program yang dikeluarkan hanya program prioritas saja, contohnya jika anggaran hanya cukup untuk lima program prioritas maka yang dikeluarkan hanya lima program itu saja dan untuk program yang belum terjalankan pada tahun ini akan dilakukan di tahun berikutnya.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa proses

penyusunan rencana kerja Dinas PMD telah melalui empat tahapan kegiatan yang sudah berjalan dengan cukup lancar, bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Bengkulu sudah mengetahui mengenai proses penyusunan rencana kerja yang ada pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Bengkulu. Namun, pada tahapan ketiga yakni mengenai mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan yang terhambat pada antusiasme masyarakat, yang sebagaimana peneliti sajikan pada kesimpulan dibawah ini:

1. Pada aspek menetapkan tujuan dan serangkaian tujuan diketahui bahwa dalam menetapkan atau menentukan keputusan-keputusan tentang keinginan dinas hal yang dilakukan oleh dinas adalah mengajukan usulan kepada pemerintah. Kemudian dalam menetapkan keputusan terkait kebutuhan organisasi dilakukan berdasarkan peraturan pemerintah serta surat keputusan gubernur.
2. Pada aspek merumuskan keadaan saat ini diketahui bahwa identifikasi pemahaman akan posisi organisasi saat ini dari tujuan yang hendak dicapai dilakukan dengan cara memahami dengan baik peraturan pemerintah yang sudah ada, mengetahui visi dan misi dinas, melakukan tugas dan fungsi dari masing-masing bidang, serta mengetahui tentang peraturanperaturan yang terbaru. Kemudian mengenai identifikasi pemahaman dinas akan posisi organisasi dan sumber daya yang tersedia diketahui bahwa saat ini sumber daya manusia serta fasilitas yang ada di Dinas PMD rata-rata sudah cukup baik. Walaupun dalam penyediaan fasilitas masih ada beberapa kekurangan seperti kekurangan lemari, kursi dan lain-lain.
3. Pada aspek mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan, diketahui bahwa pada faktor lingkungan internal kemudahan yang dimiliki Dinas PMD adalah SDM yang baik, kemudian hambatan yang dimiliki juga dapat diatasi dengan baik sehingga tidak ada hambatan yang cukup signifikan terjadi. Kemudian pada faktor lingkungan eksternal yang menjadi kemudahan serta hambatan adalah antusiasme masyarakat.
4. Pada aspek mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan, dalam melakukan pengembangan berbagai alternatif kegiatan untuk pencapaian tujuan dilakukan berdasarkan dengan visi, misi dan juga strategi yang sudah disusun oleh Dinas PMD. Kemudian pihak yang terlibat dalam pembuatan perencanaan di Dinas PMD adalah Bappeda, biro keuangan dan biro administrasi. Lalu, dalam melakukan penilaian alternatif alternatif kegiatan didasarkan pada kegiatan yang bersifat memajukan serta mensejahterakan masyarakat. Lalu, melakukan pemilihan alternatif terbaik diantara berbagai alternatif yang ada dilakukan berdasarkan pada anggaran serta prioritas yang ada pada tahun tersebut.

Saran

Agar proses penyusunan rencana kerja di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Provinsi Bengkulu berjalan dengan lancar, maka pihak dinas perlu dengan aktif serta kreatif dalam mengajak masyarakat untuk menjalankan program yang ada di dinas dan melengkapi fasilitas yang masih kurang agar tidak terjadi kendala dalam menjalankan serta merencanakan suatu program yang bisa mempengaruhi kinerja pegawai.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Afandi & Setia Hadi, 1996. *Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Perdesaan*. Jakarta. Majalah Prisma
- Daft Richard L., *Era Baru Manajemen*, (Jakarta: Salemba Empat, 2010), Ed Ke-9 ,h.212
Dokumen BAPPEDA Provinsi Bengkulu
- Eunike S. (2017). *Analisis Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA-SKPD)*
- Kuncoro dan Tadaro, 2000. *Otonomi Daerah dan Pembangunan Daerah: reformasi, perencanaan, strategi dan peluang*. Penerbit Erlangga Jakarta.
- Lakip Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Bengkulu
- Lewokeda, 2012. *Tahap Tahap Perencanaan*. Salemba Empat ,Jakarta.
- ML Jhingan. *Teori Perencanaan Pembangunan Daerah*. Bumi Aksara, Jakarta
- Riskiyani. (2013). *Analisis Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Sekretariat Presiden Tahun 2013*
- Rustam (2019). *Analisis Proses Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran Pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Palu*.
- Supriyadi, Deddy Bratakusumah 2004. *Teori Perencanaan Pembangunan*
- Tiki, Taufeni, Azwir (2008) *Analisis Penyusunan dan Penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Pada Kabupaten Indragiri Hulu*